

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional isu keamanan menjadi salah satu kajian yang menjadi fokus para penstudi hubungan internasional. Isu keamanan ini termasuk dalam *high politics* dimana dalam mencapai suatu politik tertentu menggunakan sarana-sarana tradisional, seperti kekuatan militer, perang, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional, persenjataan dan lainnya. Arti penting pertahanan dan keamanan bagi suatu negara adalah terkait dengan stabilitas nasional bagi suatu negara tersebut, selain itu pertahanan dan keamanan juga berfungsi untuk dapat menjaga serta meningkatkan integritas nasionalnya. Dengan memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat ini, suatu negara dapat menjaga keberlangsungan negaranya serta dapat menjaga keutuhan dan kedaulatannya. Di samping itu, dengan kuatnya sistem pertahanan dan keamanan tersebut, suatu negara dapat memberikan pengaruh bagi sistem keamanan global.

Sistem keamanan global pasca Perang Dunia I maupun Perang Dunia II hingga Perang Dingin telah mengalami sedikit pergeseran terkait dengan paradigma tradisional. Hal ini tidak lain adalah karena munculnya beberapa fenomena terkait dengan konflik. Dimana konflik yang terjadi saat-saat ini biasanya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat konflik intra-negara, antar-agama, antar-etnis, perang saudara, terorisme transnasional dan lain sebagainya.¹ Membahas mengenai konflik yang terjadi di suatu wilayah akan menjadi sangat kompleks, karena pasti di dalam konflik itu akan ada banyak aktor-aktor yang memainkan perannya. Salah satu contohnya adalah Turki. Turki adalah negara yang sangat aktif dalam berbagai konflik yang tengah melanda negara atau wilayah lain terutama pada wilayah regionalnya.

Republik Turki merupakan sebuah negara yang terletak dalam kawasan yang sangat strategis antara tiga benua yakni Eropa, Asia dan Afrika, membuat Turki memiliki peluang yang besar dalam memainkan pengaruhnya dalam kawasan. Ketika membahas Turki secara historis, sejak dahulu memang bangsa Turki selalu berjuang dan mengupayakan dalam hal perluasan tanah (wilayah) bahkan melakukan perluasan hingga perbatasan, perluasan kekuasaan, bahkan bangsa Turki senantiasa setia untuk membantu sekutunya dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Sekutu-sekutu Turki pada masanya sangat beragam seperti Eropa, Asia Tengah,

¹ Arry, & Junita, "Keamanan Internasional", dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, (2017), hal. 1.

India, Afrika, Semenanjung Arab dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan isu keamanan di kawasan yang strategis ini, Turki memainkan peran dengan menggunakan kekuatan militernya. Kekuatan militer Turki tidak diragukan lagi, walaupun Turki saat ini bukanlah Kekaisaran Ottoman seperti dahulu, namun angkatan bersenjata Turki saat ini adalah sebuah cerminan dan penerus dari tradisi sebelumnya. Bangsa Turki sudah terkenal sejak dahulu bahwa mereka sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan yang cakap dalam militer baik dari segi pengorganisasiannya, keberaniannya, hingga strategi berperangnya.²

Selain itu, Turki juga masuk dalam keanggotaan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 1951, yang mana aliansi ini tujuan utamanya adalah untuk menggalang keamanan bersama dan membangun kerja sama militer antar-anggotanya.³ Oleh karena itu, menjadi anggota NATO akan mendapat manfaat yang besar dalam beberapa bidang terutama dalam bidang militer. Turki sebagai salah satu anggota NATO juga merasakan manfaatnya dalam bidang militer, misalnya saat Turki mendapat ancaman militer dan keamanan dari luar maka anggota NATO akan saling bahu-membahu menggalang kekuatan untuk membantu Turki. Keuntungan lain yang Turki rasakan adalah dapat melakukan latihan gabungan dengan para anggota NATO, tentu hal ini sangat memberikan manfaat bagi Turki dalam mengasah kemampuan dan strateginya.⁴ Selain itu dengan menjaga hubungan baik dengan anggota lainnya, membuat Turki dengan mudah menjalin kerja sama terkait dengan penjualan dan penggunaan alutsista buatan sekutunya.

Dengan menggunakan kekuatan militernya tersebut, Turki dengan beraninya mengepakan sayap hingga ke berbagai wilayah. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa keterlibatan militer Turki terutama pada abad ke-21 ini, di beberapa negara seperti di Somalia, Irak, Libya, Qatar, Suriah, hingga ke wilayah Nagorno-Karabakh yang baru-baru ini konfliknya meletus kembali.⁵ Presensi atau keterlibatan Turki di beberapa kawasan ini tidak terlepas dari kuatnya militer negara ini, hal yang sangat wajar ketika negara kuat berani mengambil perannya dalam berbagai konflik.

² “How strong is the Turkish Military?”, <https://www.vartur.com/how-strong-is-the-turkish-military/> (diakses pada 7 Maret 2021)

³ Gama Prabowo. “Sejarah NATO”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/11/152633369/sejarah-nato#:~:text=Tujuan%20NATO&text=Menciptakan%20situasi%20aman%20dan%20damai,dan%20keamanan%20negara%20anggota%20NATO> (diakses pada 11 Maret 2021)

⁴ Jeanny Aipassa “Latihan Perang NATO Libatkan 50.000 Tentara”, <https://www.beritasatu.com/dunia/518660/latihan-perang-nato-libatkan-50000-tentara> (dipetik 11 Maret 2021)

⁵ Can Kasapoglu, “Turkey’s Growing Military Expeditionary Posture <https://jamestown.org/program/turkeys-growing-military-expeditionary-posture/> (diakses pada 2 Maret 2021)

Kekuatan militer Turki sudah tidak diragukan lagi terlebih, Turki merupakan salah satu anggota dari NATO, yang tentunya hal ini memberikan pengaruh yang sangat berarti.

Agresivitas Turki dalam memainkan perannya dalam kawasan ini mulai meningkat ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi presiden pertama di Turki yang dipilih secara langsung pada Agustus 2014 silam.⁶ Kebijakan luar negeri Turki pada masa Presiden Erdogan mengalami pergeseran yang awalnya setiap kebijakan-kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana *soft power* kemudian perlahan menggunakan sarana *hard power*. Tentu hal ini sangat berbeda sekali dengan kebijakan luar negeri presiden-presiden Turki sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh AKP yang mana dominasi dan arah gerakannya telah mengalami pergeseran pada identitas Negara Turki yakni partai politik yang lebih demokratis serta konservatif dan tentunya hal ini mengikis nilai sekulerisme.⁷ Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah sosok yang sangat kontroversial mengingat berbagai kebijakan-kebijakan yang diambilnya agak berbeda dengan presiden-presiden Turki sebelumnya. Pemikiran politik Erdogan dalam negara Turki yang sekuler membuat ambisinya untuk senantiasa menguasai militer.⁸ Dengan menggunakan kekuatan militer inilah, Erdogan memiliki ambisi yang kuat untuk melakukan perluasan pengaruhnya dalam kawasan. Hal ini terlihat jelas dalam kebijakan luar negerinya yang aktif dan giat dalam merespon negara lain. Dengan kata lain, Turki dibawah Erdogan pergerakannya tidak dapat diprediksi karena ia sangat teliti dalam mengambil peluang. Kapan saja Turki bisa menjadi musuh namun kapan saja Turki juga dapat menjadi sahabat bagi negara lain. Dalam isu militer ia senantiasa cepat tanggap dalam merespon suatu konflik di negara-negara kawasan.

Turki dibawah kepemimpinan Erdogan dengan penguatan militernya yang sangat aktif ini digunakan untuk mendukung kepentingan-kepentingannya terutama dalam keamanan regional. Dengan memanfaatkan posisi negaranya yang strategis serta dengan menggerakkan militernya adalah sebagian dari upayanya. Erdogan kini membawa wajah baru Turki dalam isu keamanan regional dengan menggunakan kapasitas militernya. Tulisan ini akan berfokus pada seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki Turki di tingkat dunia, serta mengapa Presiden Tayyip Recep Erdogan menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat militer. Tulisan ini akan

⁶ Elba Damhuri, "Tiga Fakta Menarik Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan"

<https://republika.co.id/berita/qd7cww440/tiga-fakta-menarik-presiden-turki-recep-tayyip-erdogan-part3>
(diakses pada 9 Maret 2021)

⁷ Agus, Saras, dan Aris, "Pengaruh Partai AKP terhadap Identitas Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Erdogan", dalam *Jurnal Global Strategis*, hal. 99.

⁸ Saeful Bahri, "Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan (Studi terhadap Pergulatan Politik Sekular Versus Islam dalam Revolusi Turki)", dalam *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, (2017), hal. 344.

membahas lebih mendalam terkait dengan alasan Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang bersifat militer.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang nantinya akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

“Mengapa Turki (pada masa kepemimpinan Presiden Erdogan) menerapkan Kebijakan Luar Negeri yang bersifat militer (militeristis)?”

1.3 Kerangka Berpikir

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan teori level analisis dan konsep geopolitik untuk menganalisis kebijakan luar negeri militeristis Turki dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan.

1. Teori Level Analisis

Dalam menganalisis sebuah kebijakan luar negeri, dapat menggunakan teori level analisis. Pendekatan dari *level of analysis* ini awalnya diperkenalkan oleh Kenneth Waltz pada penelitiannya yang berkaitan dengan sebab-sebab perang. Melalui penelitiannya tersebut Kenneth Waltz menghasilkan tiga level analisis untuk menjawab terkait dengan sebab-sebab terjadinya perang. Adapun tiga level analisis ini menurutnya adalah: *system-level*, *state-level*, dan *individual-level*. Pada analisis *system-level* fokus utama dalam penelitiannya adalah menekankan pada mencari tahu apakah ada sistem internasional yang memberikan pengaruh bagi suatu negara untuk melakukan perang. atau dengan kata lain, pada *system-level* ini, Kenneth ingin menyampaikan bahwa dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara pasti didasarkan atau disandarkan pada bagaimana situasi atau kondisi dalam sistem dunia internasional yang menekan negara untuk melakukan tindakan tertentu.⁹

Pada analisis *state-level* Kenneth lebih menegaskan dengan memberi gambaran pertanyaan: apakah negara mempunyai kecenderungan untuk berkonflik dibandingkan dengan negara lainnya? Atau dengan kata lain, analisis *state-level* mengamati perilaku kebijakan luar negeri melalui karakteristik atau sudut pandang negara. Misalnya dengan fokus mengamati pola perilaku pemerintahan di dalamnya, bagaimana tipe pemerintahannya, apakah negara itu demokratis atau otoriter, bagaimana hubungan

⁹ Robert Jackson, dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Dialih bahasakan oleh Dadan Suryadiputra dan Pancasari Suyatiman. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.448-450.

antara masyarakat domestik dengan alat-alat negara, hingga terkait dengan bagaimana birokrasi menyusun perangkat negara. Sedangkan pada analisis *individual-level* Kenneth ingin menemukan apakah sifat manusia itu bersifat agresif atau tidak. Dengan menggunakan analisis tingkat individu ini, biasanya fokus utamanya adalah pada si pembuat keputusan. Menurut Ole Holsti, manusia memiliki batasan kognitif dalam mengambil keputusan yang objektif serta keputusan yang rasional. Biasanya dalam membuat dan memutuskan kebijakan luar negerinya, si pembuat keputusan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bagaimana cara berpikirnya, apa saja prioritas dalam dirinya, dan bagaimana keyakinan dan dasar pemikirannya, dan lain sebagainya.¹⁰ Dan hal ini senada dengan William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics* menjelaskan sebuah teori tentang pengaruh kebijakan, memberikan sebuah istilah yaitu “*policy influencer*” yang maknanya adalah bahwa seorang pemimpin dalam hal ini adalah seorang yang mengambil keputusan dalam negaranya memiliki pengaruh dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹¹

Berbeda dengan Kenneth yang telah membagi tingkat analisa menjadi tiga, dalam buku yang berjudul “*Foreign Policy Analysis*” karya Valerie M. Hudson, dia menyebutkan bahwa terdapat lima tingkatan analisa, yakni individu sebagai pengambil keputusan, kelompok perumus kebijakan, budaya dan identitas nasional, politik domestik dan oposisi, serta atribut nasional dan sistem internasional. Namun pada tulisan ini penulis hanya akan fokus pada tingkat analisa individu, politik domestik serta atribut nasional dan sistem internasional. Menurut Hudson, analisa pada **tingkat individu** ini perlu di *highlight* sebagai upaya untuk memetakan personal pemimpin yang bertujuan agar dalam memahami kebijakan luar negeri dari suatu negara lebih mudah. Menurutnya ada beberapa komponen pemikiran dalam *individual decisionmaker*, diantaranya adalah terkait dengan persepsi dan kognisi, emosi individu, dan lain-lainnya. Kognisi diartikan dengan bagaimana *individual decisionmaker* ini dalam mengelola informasi. Persepsi diartikan dengan bagaimana akal si *individual decisionmaker* ini dalam memproses informasi-informasi yang

¹⁰ Ibid, hal.452-462.

¹¹ Retnachrista (2007). *Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak*. Global & Stategis, hal. 6

masuk. Dalam kognisi dan persepsi ini tingkat pengetahuan antara individu satu dengan individu yang lainnya belum tentu sama. Karena setiap individu memiliki kemampuan kognisi yang berbeda maka hal ini berakibat pada persepsi yang bermacam-macam. Sehingga pasti prasangka dan persepsi setiap pemimpin negara dalam melihat isu-isu akan beragam pula. Di samping itu, emosi menjadi salah satu cara yang paling efektif yang dengannya manusia dapat mengubah tujuan. Emosi dapat membangkitkan seorang individu (pembuat keputusan) untuk mengambil tindakan pada proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan apa yang si individu alami dan bayangkan. Emosi ini juga bisa mengarahkan serta mempertahankan perilaku individu dalam menanggapi berbagai situasi.¹² Selain itu menurut seorang psikolog yang bernama Margaret G. Herman melalui sebuah proyek CFPCREON, ia meneliti terkait dengan karakteristik kepribadian seorang pemimpin. Ia menghasilkan setidaknya tiga karakteristik umum kepribadian yakni 1) apakah seorang pemimpin individu menentang atau menghormati kendala yang dihadapi, 2) apakah pemimpin individu terbuka terhadap informasi baru, 3) dan apakah pemimpin individu dimotivasi oleh kekuatan internal atau eksternal. Dari ketiga karakteristik umum ini, Margaret mengembangkan karakteristik ini menjadi delapan orientasi yakni: ekspansionistik, evangelistik, inkremental, karismatik, pengarahan, konsultatif, reaktif, dan akomodatif. Namun pada skripsi ini hanya akan berfokus pada gaya ekspansionis saja. Maksud dari gaya ekspansionis ini menurut Margaret digambarkan dengan sikap seorang pemimpin waspada dan bijaksana dengan kata lain sikap pemimpin yang cenderung berani untuk menantang kendala-kendala yang ada, namun pemimpin seperti ini cenderung tertutup terhadap informasi-informasi baru, dan memegang fokus masalah (fokusnya adalah mengembangkan kekuatan dan pengaruh). Gaya pemimpin yang ekspansionis ini sangat memperhatikan dan peduli terhadap upaya meningkatkan kendalinya atas orang, wilayah atau bahkan sumber daya. Sehingga hal ini akan berakibat pada kebijakan luar negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang “cenderung” ekspansionis yang memiliki kemungkinan besar akan cenderung mengarah pada permusuhan dan akan berfokus pada ancaman dan musuh.¹³

¹² Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*. (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), hal. 42-49.

¹³ Ibid, hal 64-66.

Politik domestik adalah tingkat analisa yang menurut Hudson perlu dalam menganalisa kebijakan luar negeri yang ditinjau melalui variabel nasional. Karena menurutnya kebijakan luar negeri merupakan tindak lanjut atau berhubungan erat dengan kebijakan politik domestik suatu negara. Menurut Robert Dahl saat melihat politik domestik sebuah negara maka yang menjadi fokus utamanya adalah rezim. Dengan melihat rezim maka secara tidak langsung kita juga akan melihat pada bagaimana struktur yang ada pada politik domestik negara tersebut. Atau hal ini bisa diartikan bahwa kebijakan luar negeri mungkin tidak dapat dipraktikkan karena dalam struktur pemerintahan dalam negerinya terdapat aktor domestik yang tidak menyetujui kerangka kebijakan tersebut. Aktor-aktor politik domestik ini biasanya adalah lembaga-lembaga elit dalam suatu negara, misalnya badan eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif, bahkan hingga partai politik dan media.¹⁴

Selain itu menurut William D. Coplin berpendapat bahwa dalam proses mengambil keputusan dan kebijakan oleh sebuah negara, politik domestik juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan karena kebijakan dalam negeri atau politik domestik ini merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan membawa kepentingan-kepentingan nasionalnya maka bisa dibawa untuk mencapai kepentingannya dalam politik global.¹⁵

Selain itu, **atribut nasional** juga penting dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Menurut Hudson, atribut nasional ini merupakan elemen-elemen yang menjadi suatu negara memiliki kekuatan. Walaupun sebenarnya atribut nasional ini menjadi hal yang relatif dan bergantung pada masing-masing karakter setiap negara yang bersangkutan. Namun setidaknya atribut nasional menurut Hudson ini diantaranya adalah sumber daya alam, kondisi geografi, demografi, sistem politik, kapasitas militer, dan kapasitas ekonomi. Kondisi geografi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri karena kondisi geografi ini bisa mencakup hal-hal seperti batas wilayah negara, akses-akses strategis seperti pelabuhan, bandara udara dan lainnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah sistem politik suatu negara tersebut, tentu sistem politik yang diterapkan dalam negara tersebut pasti akan sangat

¹⁴ Ibid, hal. 142-145.

¹⁵ Dyan Wahyuning Tyas (2019), Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus Kontribusi Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina pada Tahun 2015, Research gate, hal. 24

berpengaruh pada kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Kapasitas militer menjadi hal yang sangat diperhatikan saat-saat ini karena pasca Perang Dingin distribusi power ini menjadi trend baru. Tentunya tingkat kekuatan militer sebuah negara menjadi atribut nasional yang sangat penting bagi tercapainya perumusan kebijakan luar negeri. Negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, baik dilihat dari segi kepemilikan senjata, jumlah angkatan bersenjata hingga teknologi yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah tersendiri karena dapat memberikan pengaruh, kontrol hingga tekanan atas negara lainnya.¹⁶ Apa yang disebutkan oleh Hudson terkait dengan beberapa atribut nasional diatas juga senada dengan apa yang William D. Coplin katakan dalam bukunya. Bahwa terdapat dua hal yang sangat bermakna bagi suatu Negara untuk melancarkan kebijakan luar negerinya selain politik domestik ialah situasi ekonomi serta elemen militer dari negara tersebut.¹⁷

2. Konsep Geopolitik

Geopolitik sebenarnya terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani yakni *geo* dan *polis*. *Geo* bermakna bumi sedangkan *polis* bermakna politik. Dengan kata lain geopolitik ini merujuk pada suatu geografi tertentu serta merujuk pada sebuah politik. Geografi berkaitan erat dengan tata ruang di permukaan bumi, sedangkan politik berkaitan erat dengan suatu pemerintahan atau bahkan kekuasaan. Selain itu, dalam kajian mengenai Hubungan Internasional, geopolitik memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah internasional dengan melihat teritorial atau ruang sebagai pokok utamanya. Dimana dalam kajian teritorial akan dijumpai beragam interaksi-interaksi yang berkaitan dengan lingkup wilayah, fungsi wilayah, hingga keterlibatan aktor-aktor di dalamnya mulai dari tingkatan paling sempit yakni lokal, hingga tingkatan yang paling luas yakni internasional.¹⁸

Dalam perkembangannya perspektif geopolitik semakin beragam, beberapa tokoh ahli memiliki perspektifnya masing-masing. Menurut Fredrich Ratzel, perspektif ruang adalah inti pemikirannya. Dimana perspektif ruang ini menyatakan bahwa tumbuhnya suatu negara hampir sama dengan tumbuhnya suatu makhluk hidup, dimana mereka membutuhkan ruang untuk bertahan hidup yang cukup agar dapat

¹⁶ Valerie M. Hudson, Op.Cit. hal. 163-169.

¹⁷ Dyan Wahyuning Tyas, Op.Cit. hal. 25

¹⁸ "Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli", <https://www.dosenpendidikan.co.id/geopolitik-adalah/#:~:text=Geopolitik%20mengkaji%20makna%20strategis%20dan,dan%20politik%2C%20serta%20unsur%20kebijaksanaan> (diakses pada 22 Maret 2021)

mempertahankan hidupnya. Semakin luas ruang atau wilayahnya maka suatu negara akan semakin kuat dan unggul. Pandangan Fredefich Ratzel ini akhirnya melahirkan dua pandangan yakni geopolitik kontinental dan geopolitik maritim. Maksudnya adalah kekuatan geopolitik dapat ditempuh dari jalur darat (kontinental) serta dapat juga melalui laut (maritim). Dalam menjaga kekuatan suatu negara maka negara harus mampu untuk memberikan fasilitas terkait dengan kedudukan kondisi geografisnya tersebut. Maka dari itu, inti pengertian politik dalam konteks ini adalah dalam rangka untuk melakukan perluasan wilayah dengan menggunakan sarana atau kekuatan-kekuatan fisik/militer agar kepentingan nasionalnya tercapai.¹⁹

Ada tiga kelompok geopolitik menurut T. H. Stevenson dan D. B. De Huszar. Adapun kelompok yang pertama ialah terkait dengan keadaan tata letak geografis baik di darat maupun di laut. Kelompok kedua adalah politik geografi yang didasarkan pada iklim dalam suatu ruang / teritorial dan juga didasarkan pada lingkup waktu. Iklim diklaim dapat memberikan pola perilaku yang berbeda bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kelompok yang ketiga didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam dimana sumber daya alam ini akan sangat memberikan akses bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keadaan geopolitik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam tersebut yang mana hal ini akan memberikan pengaruh bagi kelancaran sebuah sistem politik.²⁰

1.4 Hipotesis

Kebijakan luar negeri Turki pada masa Presiden Erdogan bersifat militer karena Turki ingin meningkatkan dominasi kekuasaan dan memperluas pengaruhnya dengan terlibat dalam merespon isu keamanan dalam kawasan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan dan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber sekunder baik yang berasal dari buku, artikel, jurnal, makalah ilmiah, surat kabar, situs internet serta sumber-sumber pendukung lainnya.

¹⁹ Dwi, Tri dan Dikdik, "Geopolitik Indonesia",
eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIK%20INDONESIA%20Dwi.pdf (diakses pada 22 Maret 2021)

²⁰ Puza Bangsawan, "Opsi Militer Rusia dalam Krisis Crimea pada Masa Vladimir Putin", kearsipan Thesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hal. 11-12.

1.6 Batasan Penelitian

Dalam membahas terkait dengan alasan Turki menggunakan opsi militer sebagai kebijakan luar negerinya, penulis membatasi pembahasan hanya fokus pada masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan antara tahun 2014-2021. Pembatasan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan tidak meluas dan keluar dari pokok penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam melakukan penulisan skripsi ini agar menjadi sebuah karya tulis, maka penulis akan membagi pembahasan-pembahasan menjadi beberapa bab agar menjadi sebuah tulisan yang utuh. Adapun berikut adalah pembagian bab dalam tulisan ini:

BAB 1 adalah Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah yang diangkat, kemudian merumuskan rumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan perspektif, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 akan membahas mengenai arah kebijakan luar negeri Presiden Erdogan

BAB 3 akan membahas mengenai geopolitik Turki dalam melaksanakan kebijakan luar negeri militeristisnya.

BAB 4 akan membahas mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.